BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk memperoleh pijakan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teori yang digunakan dan konsep yang berkaitan dengan objek penelitian, yang akan berguna dalam menganalisa masalah. Tujuannya adalah agar jalannya penelitian konsisten dari awal hingga akhir dan dapat mencapai tujuan penelitian sebagaimana telah digariskan dalam bab I.

2.1 Hubungan Internasional

Secara konseptual, Hubungan Internasional bermula saat manusia mulai tinggal menetap di suatu daerah dan membentuk diri mereka sendiri ke dalam wilayah terpisah dengan berdasarkan komunitas politik. Setiap komunitas politik yang terbentuk tidak bisa menghindari terjadinya kontak dengan komunitas lainnya. Interaksi yang terjadi antar komunitas yang ada menimbulkan efek yang saling mempengaruhi. Realitas politik kontemporer menunjukan bahwa seluruh populasi dunia terbagi ke dalam komunitas-komunitas wilayah politik, atau negara merdeka, yang sangat berpengaruh terhadap bentuk kehidupan mereka. Selanjutnya, negara-negara tersebut membentuk suatu sistem internasional. Oleh karena itu, setiap individu yang ada di bumi merupakan anggota atau warga negara dari negara yang bersangkutan. Konsekuensinya adalah hampir dapat dipastikan bahwa setiap laki-laki, wanita dan anak-anak melalui negaranya

masing-masing merupakan bagian yang integral dari sebuah sistem internasional. (Jackson & Sorensen, 1999:2).

Studi Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara-bangsa. Hubungan Internasional mengacu pada segala aspek bentuk interaksi. Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.

Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh negara ataupun warga negara. Hubungan Internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di dunia. Hubungan Internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non-negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah geografis tidak dihiraukan. (Perwita & Yani, 2005:3-4).

Hubungan Internasional berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, budaya dan interaksi lainnya di antara aktor-aktor negara dan aktor-aktor non-negara.

Hubungan Internasional juga mengkaji tentang politik internasional walaupun istilah-istilah seperti Hubungan Internasional, politik dunia (*world politics*) dan politik internasional memiliki arti yang sama. (Viotti dan Kauppi, 1993:585).

Hubungan Internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori oleh pemerintah maupun tidak. Hubungan Internasional akan meliputi kebijakan luar negeri atau proses politik antar bangsa, tetapi dengan memperhatikan keseluruhan segi hubungan itu. Hubungan Internasional juga akan mencakup studi-studi perusahaan dagang internasional (MNC), palang merah internasional, turisme, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional. (Holsti, 1987: 29).

Hubungan Internasional pada masa lampau berfokus kepada kajian mengenai perang dan damai kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang belangsung dalam hubungan antar negara bangsa dalam konteks sistem global tetapi masih betitik berat kepada hubungan politik yang lazim disebut sebagai "*High Politics*". Sedangkan Hubungan Internasional kontemporer selain tidak lagi hanya memfokuskan perhatian dan kajiannya kepada hubungan politik yang berlangsung antar negara, juga telah mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara (*non-state actors*).

Hubungan Internasional kontemporer, selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, kesenjangan Utara-Selatan, keterbelakangan, perusahaan

internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya. (Jackson dan Sorensen, 1999: 34-35).

Dengan demikian ruang lingkup yang dikaji oleh ilmu Hubungan Internasional menjadi lebih luas dengan mencakup pengkajian mengenai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Batasannya adalah bahwa Hubungan Internasional mengkaji hal-hal atau aspek-aspek tersebut dari segi keterhubungan global (*global connection*), yang non-domestik, yang melintasi batas wilayah masing-masing entitas negara.

2.2 Kerja sama Internasional

Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan kerja sama internasional. Dalam suatu kerja sama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerja sama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam Hubungan Internasional. Isu utama dari kerja sama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerja sama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tidakan yang unilateral dan kompetitif. (Doughterty & Pfaltzegraff, 1997: 419).

Dengan kata lain, kerja sama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Hal

tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerja sama internasional. (Holsti, 1992: 650).

Dewasa ini tumbuh berbagai berbagai kerja sama internasional sesuai dengan berbagai bidang kehidupan sosial, namun pada hakekatnya terdapat empat bentuk kerja sama internasional. (Kusumohamidjojo, 1987: 92-100).

1. Kerja sama Universal

   Hakekat dari kerjasama internasional yang univresal (*global*) adalah memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama dan menghindari disintegrasi internasional.

2. Kerja sama Regional

   Merupakan kerja sama antar negara yang berdekatan secara geografis. Kesamaan pandangan politik dan kebudayaan atau perbedaan struktur produktifvitas ekonomi dari negara-negara yang melakukan kerja sama, banyak menemukan apakah suatu kerja sama regional dapat diwujudkan.

3. Kerja sama Fungsional

   Negara-negara yang terlibat masing-masing diasumsikan mendukung fungsi tertentu sedemikian rupa, sehingga kerja sama itu akan melengkapi berbagai kekurangan pada masing-masing negara. Kerja sama fungsional berdasarkan dari cara berpikir pragmatis yang mensyaratkan kemampuan tertentu pada masig-masing mitra kerja sama

4. Kerja sama Ideologi

   Merupakan alat dari suatu kelompok kepentingan untuk membenarkan tujuan dari perjuangan kekuasaannya. Kelompok-kelompok kepentingan tersebut berusaha mencapai tujuannya dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka dalam forum global.

Jadi kerja sama internasional adalah usaha yang dilakukan dua negara atau lebih, dengan tidak didasari paksaan guna mencapai kepentingan dan tujuan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

2.3 Regionalisme

Salah satu konsep dalam Hubungan Internasional yang juga kembali dibicarakan baik oleh para praktisi maupun akademisi Hubungan Internasional adalah konsep regionalisme. Perbincangan mengenai konsep ini sejalan dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam Hubungan Internasional dewasa ini. Fenomena globalisasi di satu sisi menjadikan dunia menjadi lebih kecil dan memungkinkan terjadinya penyatuan wilyah baik dalam arti geografi, ekonomi, politik dan budaya namun di sisi lain, upaya pengelompokan negara-negara dalam sebuah unit kecil yang bersatu juga mengemuka.

Secara praktis, konsep regionalisme sering digunakan secara silih berganti dengan konsep kawasan (*region*) dan sub kawasan (*sebregion*) atau subsistem. Beberapa teoritisi mengklasifikasikan suatu kawAsan dalam lima karakteristik. *Pertama*, negara-negara yang tergabung dalam suatu kawsan memiliki kedekatan geografis. *Kedua*, mereka memiliki pula kemiripan sosiokultural. *Ketiga*,

terdapatnya kemiripan sikap dan tindakan politik seperti yang tercermin dalam organisasi internasional. *Keempat*, kesamaan keanggotaan dalam organisasi internasional. *Kelima*, adanya ketergantungan ekonomi yang diukur dari perdagangan luar negeri sebagai bagian dari proporsi pendapatan nasional.

Kerja sama antar negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan regional bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukanya regionalisme. Dengan membentuk organisasi regional dan menjadi anggota organisasi regional, negara-negara tersebut telah menggalang bentuk kerja sama intra-regional. Dengan kata lain, negara-negara dalam satu kawasan telah melakukan distribusi kekuasaan di antara mereka untuk mencapai tujuan bersama.

Bentuk tertinggi dari kerja sama ini adalah integrasi ekonomi. Bentuk integrasi ini sendiri terbagi ke dalam dua tingkat. *Pertama*, disebut sebagai integrasi dangkal (*shallow integration*) yang hanya mengacu pada upaya regional untuk mengurangi atau menghapuskan kendala-kendala perdagangan. Sedangkan bentuk kedua berupa integrasi dalam (*deep integration*) yang bertujuan untuk mencapi kesatuan ekonomi dan fiskal secara menyeluruh (*full economic and moneytary union*).

Bentuk berikutnya adalah *inter regionalism* dan *regional transnationalism*. Bila yang pertama mengacu pada kerja sama antar kawasan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, maka bentuk kedua mengacu pada proses kerja sama yang melibatkan aktor-aktor ekstra regionalyang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi, politik dan kultural. *Inter regionalism* juga merujuk pada perluasan hubungan antar kawasan yang dapat mengambil beberapa bentuk. Pertama adalah

hubungan antar kelompok atau organisasi regional seperti yang tercermin dalam kerja sama antara Uni Eropa dan ASEAN. Inisiatif kerja sama antara ASEAN – UE pada awalnya datang dari ASEAN sebagai respon terhadap perubahan ekonomi politik di tubuh UE dan pergeseran pada power equation yang melanda Asia. Interaksi antara ASEAN – UE ini dapat dikategorikan sebagai *bilateral inter regionalism relationship* sehingga kebutuhan untuk meningkatkan dan memperbanyak dialog antar kelompok dalam berbagai pertemuan formal maupun informal berupa pertukaran informasi dan pelaksanaan proyek bersama dalam berbagai bidang yang lebih spesifik.

Bentuk kedua adalah hubungan dua kawasan (*bi-regional*) dan antar kawasan (*trans-regional*). Hingga kini paling tidak, tercatat lima hubungan bi-regional dan transregional yang mencakup kawsan Amerika, Eropa, Asia Pasifik, dan Afrika.

Pertama, adalah *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) yang terbentuk 1989 lalu dan merupakan pengaturan *trans-regional* yang meliputi kawasan Asia Pasifik, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Hubungan *kedua*, adalah *Asia Europe Meeting* (ASEM) yang terbentuk 1996 yang merupakan pengaturan *bi-regional* Asia dan Eropa. ASEM yang melibatkan 10 negara Asia dan 15 negara anggota Uni Eropa. Hubungan *ketiga,* Kerja sama Eropa dan Amerika Latin yang tergabung dalam *The European- Latin America Summit,* kerja sama ini dibentuk tahun 1999 dan merupakan kerja sama dua kawasan antara 15 negara anggota Uni Eropa dan 33 negara Amerika latin dan Karibia. Hubungan *keempat*, adalah *The Africa-UE Summit* yang didirikan pada tahun 2000 dan

melibatkan 52 negara Afrika dan 15 negara Eropa dan terakhir adalah *The East Asia-Latin America Forum* (EALAF) yang diluncurkan 2001 lalu meliputi 13 negara Asia Timur, Australia, Selandia Baru dan 12 negara Amerika Latin.

Dari beberapa pemaparan diatas terlihat bahwa regionalisme merupakan sebuah fenomena Hubungan Internasional yang terus berkembang. Konsep ini, misalnya, tidak semata-mata hanya membicarakan unsur geografis semata, bahkan dalam banyak kasus regionalisme elemen-elemen yang terkait begitu beragam dari ekonomi hingga politik keamanan. Hal ini tentu saja akan menambah kompleksitas regionalisme sebagai sebuah konsep dan fenomena dalam Hubungan Internasional. (Perwita & Yani, 2005: 103-110).

2.4 Organisasi Internasional

Salah satu perwujudan dari kerja sama internasional adalah dengan terbentuknya organisasi internasional, sesuai dengan konstitusi pendiriannya setiap organisasi memiliki lapangan kerja yang spesifik, dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan pencerminan dari fungsi dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dapat bersifat abstrak dan fleksibel sehingga dapat dikatakan sebagai situasi dan kondisi yang akan terwujud pada masa yang akan datang. (Coulumbus & Wolfe, 1999: 279).

*Organizatio*n dalam kata *international organizatio*n sering menjadi permasalahan dengan bentuk tunggalnya (*singular*) yaitu *organization*. Dalam hal ini dijelaskan bahwa *Organization* adalah suatu proses sedangkan international *organization* adalah aspek-aspek representatif dari suatu fase dalam proses

tersebut yang telah dicapai dalam suatu waktu tertentu. Hubungan Internasional, antara pemerintah, kelompok individu, tidaklah bersifat acak tetapi bersifat terorganisir. Suatu bentuk dari Hubungan Internasional tersebut adalah institusi yaitu bentuk kolektif atau struktur dasar dari suatu organisasi sosial yang dibentuk dasar hukum atau tradisi manusia yang dapat berupa pertukaran, perdagangan, diplomasi, konferensi, atau organisasi internasional. (Archer, 1984: 2).

Organisasi Internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta dihadapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda. (Rudy, 2002, 93-94).

A Leroy Bennet menyatakan organisasi internasional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Bennet, 1995: 2-3)

1. Organisasi tetap untuk melaksanakan fungsi yang berkelanjutan.
2. Keanggotaan yang bersifat sukarela dari peserta yang memenuhi syarat.
3. Instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur dan metode operasional.
4. Badan pertemuan perwakilan konsultatif yang luas.
5. Sekertariat tetap untuk melanjutkan fungsi administrasi, penelitian dan informasi secara berkelanjutan.

T. May Rudy mengemukakan dari segi ruang lingkupnya, fungsinya, kewenangannya. Ada beberapa macam penggolongan organisasi internasional.

Suatu organisasi internasional dapat sekaligus menyandang lebih dari satu macam penggolongan, bergantung pada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya. Secara terperinci penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam segi tinjauan berdasarkan delapan hal, yaitu sebagai berikut: (Rudy, 2002: 94-97).

1. Kegiatan Administrasi: organisasi internasional antar pemerintah (*intergovernmental organization* / IGO) dan organisasi internasional non-pemerintah (*non-governmental organization* / NGO).
2. Ruang Lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan: organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.
3. Bidang Kegiatan (operasional) organisasi, seperti bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri) bidang bea cukai dan perdagangan internasional.
4. Tujuan dan Luas bidang kegiatan organisasi: organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
5. Ruang Lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan: global-umum dan global-khusus, regional-umum dan regional-khusus.
6. Menurut Taraf *Kewenangan (kekuasaan): organisasi supranasional (supranational* organization) dan organisasi kerjasama (*cooperative organization*).
7. Bentuk dan Pola Kerja sama: kerja sama pertahanan keamanan (*collective security*) yang biasanya disebut *institutionalized alliance* dan kerja sama fungsional (*funcitional cooperation*).

8. Fungsi Organisasi: organisasi politik (*political organization*), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam Hubungan Internasional. Organisasi administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administartif. Organisasi peradilan (*judical organization*), yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonomi, sosial dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai ketentuan internasional dan perjanjian internasional).

2.4.1 Teori Peranan dalam Organisasi Internasional

Organisasi internasional memiliki dan melakukan sejumlah peranan penting, yaitu menyediakan sarana kerja sama di antara negara-negara dalam berbagai bidang dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya, selain tempat dimana keputusan tentang kerja sama ini dibuat, juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan menjadi tindakan, selain itu organisasi internasional menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah. (Bennet, 1995:3)

Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: (Archer, 1984: 130-147).

1. Sebagai Instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.

2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Kemudian eksplorasi dan analisis aktivitas organisasi internasional akan menampilkan sejumlah peranannya, yaitu: (1) Inisiator, (2) Fasilitator, (3) Mediator, (4) rekonsiliator, (5) Determinator. (Pareira**,** 1999: 135).

Organisasi internasional dalam isu-isu tertentu berperan sebagai aktor yang independen dengan hak-haknya sendiri. Organisasi internasional juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan, memonitor, dan menengahi perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara-negara. (Viotti & Kauppi, 1999: 228).

Suatu organisasi internasional yang bersifat fungsional sudah tentu memiliki fungsi dalam menjalankan aktivitasnya. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai kepentingan yang hendak dicapai, berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait. Fungsi organisasi internasional itu antara lain: (Perwita & Yani, 2005:97).

1. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerja sama yang dilakukan antar negara dimana kerja sama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
2. Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan.

2.5 Ekonomi Internasional

Ekonomi internasional membahas hubungan ekonomi antar negara di dunia. Hubungan tersebut menimbulkan saling ketergantungan (*interdependence*) antara satu negara dengan negara yang lainnya, dan merupakan hal yang sangat penting terhadap peningkatan kesejahteraan hidup hampir semua negara di dunia. Ekonomi internasional mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan ekonomi antar satu negara dengan negara lainnya. tujuan dari ekonomi internasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran manusia yang dalam pelaksanaannya merupakan kerja sama antar bangsa dan negara, dimana dalam kerja sama itu suatu kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu negara dapat dipenuhi oleh negara lain.

Hubungan negara dengan ekonomi internasional selalu mempunyai masalah karena menurut teori realis, sistem internasional adalah anarki. Anarki sangat sulit untuk diatur walau pun dengan rezim yang efektif sekalipun. Apabila ekonomi internasional sangat penting terhadap kesejahteraan dari suatu negara maka otomatis menjadi suatu isu-isu politikal yang signifikan. Secara keseluruhan dari ekonomi nasional menjadi stuktur internasional seperti produksi,

perdagangan, sumber daya, finansial, akan membuat beberapa isu-isu ekonomi politik, dimana resolusi akan menjadi berbeda menurut keadaan yang spesifik dari industri dan sektor-sektor nasional ekonomi lainnya.

Seperti melindungi industri domestik melalui ketentuan perdagangan (*term of trade*), proteksi, tarif prinsip (pajak), dan *quota* (limit dari jumlah impor), telah menjadi cara konvesional untuk meyakinkan produksi domestik bukanlah tumpahan oleh import yang murah saja. Tapi apabila suatu industri sukses di perdagangan internasional maka perhatian industri tersebut kemungkinan tidak harus dilindungi, karena harus memikirkan biaya dari komponen-komponen yang essensial dan karena kekhawatiran dari ancaman-ancaman pesaingnya. Maka sangat wajar apabila sebagian sektor industri atau ekonomi menginginkan dukungan dan perlindungan. (Rudy, 2003: 11).

2.5.1 Konsep Interdependensi

Kesadaran adanya saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain inilah yang mendasari pemikiran akan perlunya suatu konsep yang mampu menjembatani berbagai kepentingan khususnya dalam bidang ekonomi. Ada dua pendapat mengenai konsep interdependensi. *Pertama*, ada pendapat yang menyatakan bahwa konsep interdependensi merupakan penyempurnaan dari teori ketergantungan (dependensia), yang pada dasarnya ingin menjelaskan struktur ekonomi global yang semakin kompleks daripada sekedar dikotomi pusat-periferi. Kompleksitas ini merupakan refleksi dari meningkatnya persaingan dan ketegangan di dalam negara-negara pusat (Eropa Barat menjadi semakin tergantung dibanding AS, Eropa Timur, dan Rusia), adanya industrialisasi di

negara-negara periferi (misal: Korea, Selatan), dan deindustrialisasi di negara-negara pusat (misal: Inggris), dan munculnya kekuatan-kekuatan regional (Brazil, India, Nigeria). *Kedua*, konsep interdependensi menyiaratkan bahwa manusia di planet bumi ini berada dalam satu perahu yang sama. Kendati demikian pendapat ini mengabaikan fakta bahwa penumpang-penumpang dalam perahu yang sama tidak berpergian pada kelas yang sama, bahkan tidak punya akses yang sama terhadap pelampung maupun kapal penyelamat.

Ada beberapa dimensi yang mendasari lahirnya konsep interdependensi sebagai perkembangan dari konsep ketergantungan. Dimensi tersebut meliputi:

1. Dimensi Fisik, muncul pertama kali pada tahun 1970an, terutama setelah diadakannya konferensi lingkungan oleh PBB pada tahun 1972. konferensi lingkungan tersebut memunculkan kesadaran akan adanya satu bumi, dimana kegiatan suatu negara akan mempengaruhi keseimbangan lingkungan secara global.
2. Dimensi Ekonomi, muncul yang mendasari konsep interdependensi ini pertama kali dikemukakan dalam proposal yang diajukan oleh *Brandt Commission Report* pada tahun1980. Dalam proposal tersebut, menghendaki adanya hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Dalam huhungan tersebut memungkinkan terciptanya kondisi *win-win position* (posisi saling menguntungkan) dan bukan lagi kondisi *zero sum game* (yang satu untung yang lain rugi) sebagaimana diterapkan dalam konsep ketergantungan.

Adanya keterkaitan antar negara dalam dimensi fisik maupun ekonomi diharapakan akan menciptakan adanya kerja sama yang mendorong adanya

perdamaian dan pembangunan dunia. Perkembangan konsep ketergantungan menuju konsep interdependensi ini mengakibatkan adanya transisi dalam perekonomian dunia. Kondisi pendukung tersebut meliputi: *Pertama*, aliran dana dan pola investasi. *Kedua*, perubahan teknologi dan internasionalisasi produk. *Ketiga*, adanya perdagangan dan aturan-aturan internasional lainnya. (Kuncoro, 1997: 107).

Interdependensi sebenarnya merupakan turunan dari persepektif liberalisme yang terdapat dalam studi hubungan internasional. Liberalisme interdependensi miliki asumsi bahwa modernisasi akan meningkatkan tingkat interdependensi antar negara. Aktor transnasional menjadi semakin penting, kekuatan militer merupakan instrumen yang tidak absolut dan kesejahteraan merupakan tujuan yang dominan dari negara. Interdependensi kompleks akan menciptakan dunia Hubungan Internasional yang jauh akan lebih kooperatif.

Saling ketergantungan (interdependensi) dapat terjadi dalam berbagai isu, seprti ekonomi, politik, dan sosial. Saling ketergantungan mengacu pada situasi yang dikarakteristikan dengan adanya efek resiprokal antara negara atau antara aktor negara yang berbeda, dimana efek ini sering kali merupakan hasil dari transaksi internasional, yaitu aliran arus barang, uang, manusia dan informasi yang melewati batas negara.

Dalam interdependensi keberhasilan suatu negara dalam bekerjasama berpijak pada dua hal yakni *power* dan kemampuan tawar menawar (*bargaining position*), dan rezim internasional. *Power* dan kemampuan tawar menawar terutama berkaitan dengan kondisi interdependensi yang asimetris. Hal ini

dikarenakan meski dalam teorinya hubungan interdependensi mengarahkan pada suatu hubungan yang timbal balik, namun dalam kenyataannya hubungan yang simetris tersebut jarang terjadi. Karena itu *power* aktor dalam hubungan interdependensi akan beragam sesuai dengan isunya. Kemudian, rezim internasional akan bertumpu pada saling ketergantungan asimetris yang menyediakan setiap pihak untuk saling mempengaruhi melalui kebijakan-kebijakan ekonomi politiknya dalam mencapai kesepakatan di antara mereka. (Perwita & Yani, 2005: 78-79).

2.6 Ekonomi Politik Internasional

Secara umum ekonomi politik internasional merupakan studi yang saling mempelajari saling keteruhubungan antara ekonomi internasional dengan politik internasional, yang muncul akibat berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam sistem internasional. Pengkajian ekonomi politik internasional membutuhkan integrasi teori-teori dari disiplin ekonomi dan masing-masing bergantung pada sumberdaya dan produk dari negara lainnya. Karena itu kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara akan memberikan akibat yang cepat dan serius pada negara lainnya, bahkan kebijakan domestik pun bisa memiliki implikasi yang lebih luas ke negara lainnya. (Robert, 1997: 24).

Studi ekonomi politik internasional secara luas mempunyai arti sebagai studi yang membahas tentang variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi perilaku politik suatu negara dalam arena internasional, yaitu bagaimana soal-soal ekonomi seperti inflasi, defisit neraca perdagangan atau pembayaran, penanaman

modal asing, efisiensi produksi dan sebagainya berkaitan dengan urusan politik internasional dapat diartikan sebagai studi yang mempelajari hubungan fenomena politik dan ekonomi yang saling berkaitan dan interaksi antar negara, pasar antara lingkungan domestik dengan lingkungan internasional dan antara pemerintah dengan masyarakat. (Mas'oed, 1994: 2-3).

Pemaknaan umum yang ditemukan dari hakekat pendekatan ekonomi politik internasional, adalah sebagai suatu studi tentang saling ketergantungan antara masalah ekonomi politik dan sosial dalam arena internasional. Konfigurasi pendekatan ekonomi politik internasional adalah tidak tunggal (monodisiplin), artinya bahwa implementasi alat-alat analisisnya dapat dilihat pada sejumlah teori dan konsep-konsep yang mendasari substansi ekonomi politik itu, seperti interdependensi, dependensi, keterbelakangan, petumbuhan, perkembangan, pembangunan ekonomi sosial, idealisme, linier, strukturalis internasional, globalisasi dan regionalisme. (Ikbar, 1995:21).

2.6.1 Teori Merkantilisme

Paham merkantlis berpandangan bahwa dalam Hubungan Internasional negara-negara saling bersaing untuk memenuhi kepentingan ekonominya masing-masing. Istilah lain yang dikenal untuk paham ini seperti nasionalisme ekonomi, ekonomi politik, proteksionisme, isolasionalisme. Pendekatan Hubungan Internasional yang digunakan dalam perspektif ini yakni melalui hubungan bilateral. Dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara, paham merkantilis kerap memunculkan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan proteksi, regulasi, subsidi dan pengenaan pajak yang kesemuanya itu diarahkan untuk

menghasilkan keuntungan (*profit*) dan surplus ekonomi bagi negara tersebut (misal: Jepang, China, AS).

Neo-merkantilisme merupakan versi dari merkantilisme yang berkembang pada periode setelah PD II. Pada dasarnya neo-merkantilisme merupakan kebijakan merkantilisme yang digunakan pada sistem liberalisasi perdagangan internasional. Dalam buku *Global Political Economy*: *Understanding the International Economic Order*, Robert Gilpin menjelaskan bahwa perspektif neo-merkantilisme mencakup bantuan dari negara lain, regulasi dan proteksi sektor industri spesifik untuk meningkatkan rasa kompetitif internasional mereka dan meraih *commanding heights* dari ekonomi global. (Perwita & Yani, 2005: 27,79-80).

Kaum merkantilis menyatakan bahwa perekonomian seharusnya tunduk pada tujuan utama peningkatan kekuatan negara, politik harus diutamakan daripada ekonomi. Ringkasnya, merkantilisme menganggap perekonomian tunduk pada komunitas politik dan khususnya pemerintah. Aktivitas ekonomi dilihat dalam konteks yang lebih besar atas peningkatan kekuatan negara. Organisasi yang bertanggung jawab dalam mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional, yang disebut negara, memerintah di atas kepentingan ekonomi swasta. Kekayaan dan kekuasaan adalah tujuan yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Ketergantungan ekonomi pada negara-negara lain seharusnya dihindari sejauh mungkin. Ketika kepentingan ekonomi dan keamanan pecah, kepentingan keamanan mendapat prioritas. (Jackson & Sorensen, 1999: 233-234).

2.6.2 Teori Liberal

Para penganut liberalisme berpendapat bahwa negara bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Selain negara terdapat juga aktor-aktor non-negara (non-state actors) yang mempunyai pengaruh dan legitimasi yang independen dari negara. Istilah lain untuk paham ini yaitu *liberalism, liberal institutionalism, dan transnasionalism*. (Perwita & Yani, 2005: 27).

Kaum liberal memiliki pilihan yang berbeda dari kaum merkantilisme, pencapaian kesejahteraan ekonomi melalui perdagangan bebas dan pertukaran ekonomi terbuka melawan pencapaian kekuatan melalui kekuatan militer dan perluasan wilayah. Dengan kata lain negara-negara dapat memilih jalan pembangunan ekonomi dan perdagangan dan kemudian menjadi negara pedagang seperti yang dilakukan Jerman Barat dan Jepang setelah Perang Dunia II.

Liberalisme ekonomi muncul sebagai kritik terhadap kontrol politik dan pengaturan permasalahan ekonomi yang menyeluruh, mendominasi pembentukan negara Eropa di abad ke-16 dan ke-17, yakni merkantilisme. Kaum ekonomi liberal menolak teori dan kebijakan yang men-subordinat ekonomi pada politik.

Ringkasnya, kaum ekonomi liberal berpendapat bahwa perekonomian pasar merupakan suatu wilayah otonom dari masyarakat yang berjalan menurut hukum ekonominya sendiri. Pertukaran ekonomi bersifat *positive sum game*, dan pasar cenderung akan memaksimalisasi keuntungan bagi semua individu, rumah tangga, dan perusahaan yang berpartisipasi dalam pertukaran pasar. Perekonomian merupakan wilayah kerja sama bagi keuntungan timbal balik antar negara dan juga antar individu. Dengan demikian, perekonomian internasional seharusnya didasarkan pada perdagangan bebas. Para ekonomi liberal klasik memandang

peran negara seolah-olah meninggalkan pasar sendirian, termasuk pasar internasional dan juga pasar nasional: *laissez-faire*. Tetapi beberapa kaum ekonomi liberal abad keduapuluh mendukung keterlibatan negara yang meningkat dalam pasar. (Jackson & Sorensen, 1999: 234,236,237-238).

2.7 Perdagangan Internasional

Perdagangan antar negara atau lebih dikenal dengan perdagangan internasional, sebenarnya sudah sejak jaman dahulu, namun dalam ruang ligkup dan jumlah yang terbatas, di mana pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi, dipenuhi dengan cara barter, yaitu pertukaran barang dengan barang yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak, di mana masing-masing negara tidak dapat memproduksi barang tersebut untuk kebutuhannya sendiri. Hal ini terjadi karena setiap negara dengan negara *partner* dagangannya mempunyai beberapa perbedaan, diantaranya perbedaan kandungan sumber daya alam, iklim, penduduk, sumber daya manusia, spesifikasi tenaga kerja, konfigurasi geografis, teknologi, tingkat harga, struktur ekonomi, sosial politik dan sebagainya.

Dari perbedaan tersebut di atas, maka atas dasar kebutuhan yang saling menguntungkan, terjadilah proses pertukaran, yang dalam skala luas dikenal sebagai perdagangan internasional. Beberapa teori yang menerangkan tentang timbulnya perdagangan internasional pada dasarnya adalah sebagai berikut: (Priangani, 2006: 7-11).

1. Teori Klasik
    a. Kemanfaatan Absolut (*absolut advantage*) oleh Adam Smith.

Teori ini lebih mendasarkan pada besaran (variabel) rill bukan moneter sehingga sering dikenal dengan nama teori murni (*pure theory*) perdagangan internasional. Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatiaanya pada variabel rill seperti misalnya, nilai suatu barang diukur dengan banyakanya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang.

b. Kemanfaatan Relatif (*comparative advantage*) oleh Jhon Stuart Mill.

Teori menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki *comparative advantage* terbesar dan mengimpor barang barang yang memiliki *comparative disadvantage*, yaitu suatu barang yang dapat dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar.

c. Biaya Relatif (*comparative cost*) oleh David Ricardo.

Teori ini menyatakan tentang nilai (*value*) suatu barang tergantung dari banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut (labour cost value theory).

2. Teori Modern

a. Faktor Proporsi (Hecker dan Ohlin)

Teori ini menyatakan bahwa perbedaan dalam *opportunity cost* suatu negara dengan negara lain karena adanya perbedaan jumlah faktor produksi yang dimilikinya. Suatu negara memiliki tenaga kerja lebih banyak daripada negara lain, sedang negara lain memiliki kapital lebih

banyak daripada negara tersebut sehingga dapat menyebabkan terjadinya pertukaran.

b. Kesamaan harga faktor produksi (*factor price equalization*) oleh P. Samuelson.

   Inti dari teori ini adalah bahwa perdagangan bebas cenderung mengakibatkan harga faktor-faktor produksi sama di beberapa negara.

c. Permintaan dan Penawaran (teori parsial).

   Pada dasarnya perdagangan antara dua negara timbul karena adanya perbedaan di dalam permintaan mapun penawaran.

d. Kurva kemungkinan produksi dan *indifference* (*production possibilities* dan *indifference curves*)

   Maksudnya kurva dapat dihasilkan dengan sejumlah faktor produksi tertentu yang dikerjakan dengan sepenuhnya (*full employment*). Bentuk daripada kurva ini tergantung daripada anggapan tentang ongkos alternatif (*opportunity cost*) yang digunakan.

e. Offer curve

   Alat analisa offer curve dikemukakan oleh James Meade seorang ahli ekonomi dari Inggris untuk menjelaskan terjadinya keseimbangan harga internasional.

2.7.1 Liberalisasi

Seiring dengan adanya proses pembangunan yang berlangsung di negara sedang berkembang liberalisasi dan pengurangan campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian semakin dirasakan mendesak untuk dilaksanakan.

Liberalisasi mempunyai beberapa karakteristik khusus. Karakteristik tersebut setidaknya meliputi: *Pertama,* liberalisasi lebih mudah diterapkan dibandingkan penyesuaian struktural. *Kedua,* proses liberalisasi yang terjadi pada umumnya didorong oleh kegagalan dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan milik pemerintah (BUMN). *Ketiga,* liberalisasi banyak meperoleh dukungan terutama di kalangan swasta. *Keempat,* pengurangan campur tangan pemerintah, deregulasi dan liberalisasi terbukti mampu menurunkan defisit serta meningkatkan penerimaan pajak. *Kelima,* liberalisasi yang dilaksanakan hendaknya bersifat luwes sehingga mampu mengantisipasi kegagalan dari kebijakan *exportled growth* yang diterapkan oleh pemerintah.

Liberalisasi di negara sedang berkembang merupakan usaha pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja dari persuhaan-perusahaan pemerintah melalui peningkatan efisiensi, likuidasi dan swastanisasi. Menurut Wilber, Charles. K & Kenneth. P. Jameson, Liberalisasi di negara sedang berkembang mempunyai beberapa perbedaan bila dibandingkan dengan liberalisasi di negara industri. Perbedaan-perbedaan tersebut meliputi setidaknya pada dimensi berikut: (Kuncoro, 1997: 440)

1. Liberalisasi di negara sedang berkembang menitikberatkan pada pengurangan defisit anggaran dan tingkat inflasi. Sedangkan di negara-negara industri, liberalisasi ditunjukan untuk meningkatkan anggaran pemerintah melalui penjualan aset-aset negara kepada swasta.
2. Tujuan pelaksanaan Liberalisasi di negara sedang berkembang ditekankan pada pencapaian progaram redistribusi pendapatan, sedangkan di negara

industri liberalisasi lebih ditujukan pada pembentukan kelas menengah baru sebagai pendukung sistem pasar.

3. Terbatasnya kelas menengah di negara sedang berkembang menyulitkan pembentukan modal melalui pasar modal. Dengan meningkatnya kelas menegah di negara industri sebagai akibat adanya liberalisasi, mendorong tumbuhnya investasi swasta.
4. Untuk meningkatkan modalnya, kebanyakan perusahaan swasta di negara sedang berkembang lebih senang menggunakan sistem perbankan (hutang pada bank) dibandingkan menjual sahamnya di pasar modal. Sedangkan perusahaan swasta di negara industri lebih menyukai menjual sahamnya melaui pasar modal dibandingkan meminjam modal dari bank.
5. pelaksanaan liberalisasi di negara sedang berkembang tidak terlepas dari pertimbangan unsur kedaerahan dan perbedaan etnik, dimana pertimbangan tersebut jarang ditemui di negara-negara industri.

2.7.2 Liberalisasi Perdagangan

Perkembangan ekonomi dunia yang begitu pesat telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan dan mempertajam persaingan yang menambah semakin rumitnya strategi pembangunan yang mengandalkan ekspor di satu pihak, hal ini merupakan tantangan dan kendala yang membatasi. Di pihak lain hal tersebut merupakan peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam kerangka hubungan perdagangan internasional, berbagai upaya masih dijalankan agar usaha memperbaiki sistem perdagangan dunia melalui

perundingan perdagangan multilateral dalam kerangka, yaitu perundangan dalam Putaran Uruguay, dapat segera memberi hasil positif, yaitu terciptanya perdagangan dunia yang adil, bebas dan terbuka .

Ada tiga alasan pokok dalam kerangka paradigma neoklasik yang dipercayai melandasi kebijakan liberlaisasi total perdagangan luar negeri, yang dianjurkan sebagai lawan terhadap restriksi perdagangan yaitu:

1. Untuk menghindarkan apa yang disebut *X-inefficiency*. Kebijakan liberalisasi perdagangan internasional diantisipasikan akan mampu mendorong berlangsungnya proses rasionalisasi industri, bersamaan dengan proses alokasi sumber-sumber ekonomi yang optimal.
2. Untuk menghindari dan meminimumkan ketidakstabilan ekonomi makro yang menjurus kepada timbulnya apa yang disebut *stop-go macroeconomic cycles*. Kebijakan proteksi yang disertai oleh adanya kurs mata uang yang tidak realistis (*over valued currency*) cenderung akan mengakibatkan terjadinya *foreign exchange bootlenecks.*
3. Untuk mendorong berlangsungnya proses produksi dalam skala penuh, dengan memperluas produksi untuk ekspor. Liberalisasi perdagangan internaisonal diantisipasikan akan menimbulkan situasi produksi yang berciri *increasing retrun to scale*, sehingga dapat kompetitif di pasaran internasional. Situasi produksi ini dapat di raih melalui ekspansi pasar, baik pasar domestik maupun pasar eksternal.

Selama ini setiap negara pada umumnya meyakini bahwa tidak satupun negara di dunia yang dapat mengisolasi diri dari proses globalisasi. Dengan

demikian penerapan perdagangan dan investasi bebas adalah pilihan baik yang harus dilaksanakan.

Namun kenyataan menunjukan lain, dimana hasil studi membuktikan bawa manfaat yang lahir dari penerapan liberalisasi perdagangan dan investasi tidak sama bagi setiap bangsa. Bahkan yang lebih memprihatinkan, ternyata yang paling banyak menerima manfaat dari liberalisasi tersebut pada umumnya adalah negara-negara maju dan bukan negara-negara berkembang atau negara yang paling membutuhkan.

Para pejuang perdagangan bebas pada umumnya berpendapat bahwa pada awal penerapan liberalisasi perdagangan, bobot keuntungan liberalisasi akan dinikmati oleh negara-negara maju. Namun kalau di lihat jangka panjang, baik negara berkembang maupun negara maju akan dapat memetik manfaat dari liberalisasi perdagangan. Kalau pun kenyataan ini benar adanya, tentu yang menjadi pertanyaan apakah negara-negara berkembang cukup sabar menanti datangannya keuntungan dan menyaksikan negara-negara maju menikmati keuntungan tersebut terlebih dahulu. (Halwani, 2002: 224-228).

2.7.3 Investasi Internasional

Teori penanaman modal internasional telah cukup banyak dikembangkan dari teori klasik, yang berdalil bahwa perbedaan-perbedaan dalam suku bunga investasi dengan risiko yang sama adalah alasan pindahnya modal internasional dari satu negara ke negara lain. Agar hal ini tidak terjadi, harus ada persaingan sempurana, tetapi seperti yang dinyatakan oleh Kindleberger seorang ahli ekonomi terkemuka bahwa dalam persaingan sempurna, investasi langsung luar

negeri tidak akan terjadi, juga kemungkinan tidak akan terjadi di dunia yang kondisinya bahkan agak kompetitif.

Investasi luar negeri dapat dibagi menjadi dua komponen:

(Ball,dkk, 2005: 87).

1. Investasi Portopolio, yang merupakan pembelian saham-saham dan obligasi semata-mata dengan tujuan memperoleh laba atas dana yang ditanamkan
2. Investasi Langsung, di mana investor berpartisipasi dalam manajemen perusahaan selain mendapatkan laba atas uang mereka.

Perbedaan antara kedua komponen ini telah mulai kabur, khusunya dengan semakin besarnya ukuran dan jumlah *merger*, akuisisi, dan aliansi internasional pada tahun-tahun terakhir. Sebagai contoh, investasi oleh investor asing dalam saham perusahaan domestik pada umumnya diperlakukan sebagai investasi langsung apabila rasio penyertaan modal investor adalah 10% atau lebih. Sebaliknya, transaksi yang bukan akibat investor asing memperoleh paling sedikit adalah 10% kepemilikan saham digolongkan sebagai investasi portopolio.

Foreign Direct Investment (FDI) diartikan sebagai transfer sumber daya finansial oleh suatu perusahaan, yang sering berbentuk sebuah perusahaan multinasional. Transfer ini melintasi batas-batas negara dan dilakukan untuk menghadirkan diri secara komersial dalam ekonomi yang lain (*host economy*), juga dalam perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui investasi baru *(greenfield investments*). Dalam hal ini investor asing membangun suatu perusahaan di ekonomi tuan rumah dengan membeli sumber daya langsung, atau ia menggabungkan perusahaannya secara lintas batas atau ia mengambil alih

perusahaan yang ada. Ini terjadi bila suatu perusahaan asing membeli saham perusahaan lokal yang terdaftar dalam pasar modal domestik. Pemilikan asing sebesar 10% dari *ordinary shares of voting stock* dalam suatu perusahaan merupakan tingkat kepemilikan minimal bagi investasi langsung umumnya dilakukan tanpa perubahan dalam pimpinan perusahaan, kecuali apabila perusahaan tuan rumah itu dibeli seluruhnya atau sebagian (BIE Report, 1995: 21)

Suatu perbedaan yang sering dibuat antara investasi langsung dan portopolio terletak pada derajat pengaruh yang dimiliki investor. Ciri utama unit investasi langsung adalah bahwa perusahaan asing yang membeli kekuasaan dapat melakukan pengendalian atas proses pengambilan keputusan dalam unit di mana ia menanamkan modalnya. Sebaliknya, perusahaan asing yang membeli saham dari perusahaan di pasar modal tuan rumah dengan nilai di bawah ambang itu dianggap sebagai ciri investasi portopolio.

Dari sudut pandang negara, investasi modal portopolio terutama dilakukan oleh individu dan lembaga kepada individu dan institusi secara lintas batas melalui mekanisme pasar modal. Investasi semacam ini kurang disenangi oleh pemerintah tuan rumah karena ia tidak memberikan manfaat yang biasanya didatangkan oleh investasi langsung. Lagi pula, investasi portopolio kurang stabil dan rentan terhadap *capital flight*. Oleh karena pemerintah tuan rumah biasanya memberlakukan peraturan yang berbeda bagi FDI dan investasi portopolio. (PECC, 1995a). Jadi, ciri khas investasi langsung ialah, *pertama*, sebagai perusahaan yang melakukan investasi, ia membeli kekuasaan untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan asing.

Jangkauan kekuasaan itu bergantung kepada ekuiti partisipasinya, terutama terhadap investor-investor lainnya. *Kedua*, FDI biasanya disertai transfer masukan faktor lain dalam bentuk pengetahuan dan ide. Dengan demikian, FDI biasanya datang sebagai suatu paket yang terdiri dari modal, teknologi dan keterampilan yang dapat mempunyai *spill-over effect* atas pertumbuhan dan pembanguanan ekonomi.(Jamtomo, 1997: 2-5).